

DISERTASI

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA**

*(Election of the President and Vice President of the Republic of
Indonesia base on 4th element of Pancasila)*



Oleh :

YUSUF MUSTAFA
NIM : 1331500468

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

DISERTASI

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA**

*(Election of the President and Vice President of the Republic of
Indonesia base on 4th element of Pancasila)*



Oleh :

YUSUF MUSTAFA
NIM : 1331500468

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA**

*(Election of the President and Vice President of the Republic of
Indonesia base on 4th element of Pancasila)*

DISERTASI

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Oleh :

YUSUF MUSTAFA
NIM : 1331500468

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Mustafa
NIM : 1331500468
Program : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA

*(Election of the President and vice President of the Republic of Indonesia
base on 4th element of Pancasila)*

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2020

Yang menyatakan



YUSUF MUSTAFA



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Mustafa
NBI : 1331500468
Fakultas : Hukum
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive
Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

"Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Berdasarkan Sila ke-4 Pancasila"

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-
Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau
memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 19 Februari 2020

Yang Menyatakan,



(Yusuf Mustafa)

DISERTASI

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA

OLEH :
YUSUF MUSTAFA
NIM : 1331500468

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji Ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal, 10 Januari 2020

Ketua : Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

Anggota : Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.

Dr. Hufron, SH., MH.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

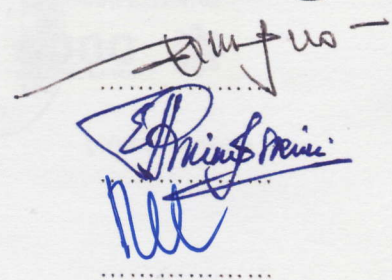
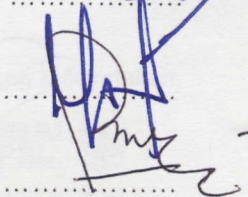
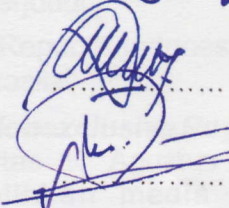
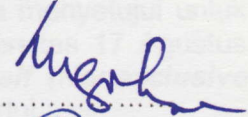
Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.

Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum.

Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum.

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH.

Prof. Dr. Amiartuti, SH., MM.



**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Telah Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal, 10 Januari 2020

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.
Promotor

Dr. Hufron, SH., MH.
Ko.Promotor

Mengetahui:



Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

**Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Hukum**

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

DISERTASI

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA**

*(Election of the President and Vice President of the Republic of Indonesia base
on 4th element of Pancasila)*



**Oleh
YUSUF MUSTAFA
NIM: 1331500468**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh :

YUSUF MUSTAFA

NIM: 1331500468

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2020**

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA**

Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Terbuka Disertasi
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Telah Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal, 10 Januari 2020

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.
Promotor

Dr. Hufron, SH., MH.
Ko.Promotor

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

**Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Hukum**

Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

DISERTASI

**PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA**

OLEH : YUSUF MUSTAFA

NIM : 1331500468

Telah diuji dan direvisi di depan Tim Penguji Ujian Terbuka
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal, 10 Januari 2020

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

Anggota : Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.

Prof. Dr. Made Warka, SH., M.Hum.

Dr. Hufron, SH., MH.

Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.

Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum.

Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum.

Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum.

Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH.

Prof. Dr. Amiartuti, SH., MM.

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Mustafa
NIM : 1331500468
Program : Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN SILA KE-4 PANCASILA

*(Election of the President and vice President of the Republic of Indonesia
base on 4th element of Pancasila)*

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2020

Yang menyatakan

YUSUF MUSTAFA

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT serta junjungan Nabi Muhammad SAW atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik dan lancar.

Disertasi yang berjudul “**Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Sila ke-4 Pancasila**” ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak khususnya kepada para Guru Besar, Promotor-Kopromotor dan rekan-rekan seangkatan yang senantiasa memberikan dukungan moril, doa, dan semangat kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungannya guna terwujudnya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih ini selanjutnya saya sampaikan kepada:

- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum selaku dosen dan Promotor saya yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga maupun pikiran untuk berdiskusi yang menyangkut masalah perlunya penekanan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini. Diskusi-diskusi yang diberikan tersebut sangat penting agar saya dapat menangkap dan menterjemahkan pemikiran-pemikiran beliau terhadap penyempurnaan materi yang sedang saya tekuni.
- Dr. Hufron, SH.,MH. selaku Ko-Promotor, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tulus kepada saya selama menyusun proposal hingga selesainya laporan penelitian ini. Atas berbagai masukan-masukan dan perhatian penuh yang diberikan kepada saya, terutama untuk kajian-kajian teori melalui literatur maupun kesediaan dalam diskusi-diskusi yang diberikan kepada saya, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Dr.Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPA, Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Hukum pada awal studi pada Strata Tiga (S-3), yang selanjutnya digantikan oleh Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA., pada akhir-akhir studi saya.
- Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Dekan yang telah memberi ijin dan kesempatan saya dengan penuh pengertian untuk segera menyelesaikan program doktor ini, yang di awal studi saya dijabat oleh BapakDr Otto Yudianto, SH., M.Hum.

- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum selaku dosen dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, dengan penuh ketelatenan dan kesabaran serta ketulus ikhlasannya telah banyak memberikan dorongan, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penulisan sejak proposal hingga hasil penelitian disertasi ini selesai. Masukan-masukan dari beliau terkait metode dalam penulisan karya ilmiah sangat membantu saya dalam memperbaiki disertasi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Semua Dosen yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada saya pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang terhormat : Bapak Prof. Dr. M. Isnaini,SH,MS., Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,SH.,MH, Bapak Prof. Dr. Teguh Prasetyo,SH.MSi, Bapak Prof. Dr. Nyoman Nurjaya,SH.,MH, Bapak Prof. Dr. IBR Supancana,SH.MH, Bapak Dr. Krisnadi Nasution,SH.,MH, Bapak Dr. Sutanto Soepiadhy,SH.,MH, dan Bapak Dr. Fajar Sugianto,SH.MH.
- Staf Tata Usaha Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan waktu dan perhatian serta bantuan, sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi saya ini.
- Rekan-rekan Angkatan 30 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Terima kasih yang telah memberikan doa dan dukungannya serta motivasinya sehingga penulisan Disertasi dapat diselesaikan dengan baik.
- Ungkapan terima kasih, hormat dan rasa syukur yang tiada batasnya yang ditujukan kepada Ayahanda, H.Mustafa dan Ibunda, Hj.Aminah (almarhum) yang selalu mendambakan kesuksesan/keberhasilan anak-anaknya yang susah payah dan penuh kasih sayang, telah mendidik dan membesarkan anak-anaknya.
- Istriku tercinta, Hj. Suwarni,SH dan Putra-putriku tercinta, Ayu Safitri,SH, dr. Ade Ulfa, Zulfikar,SH dan Adiyatma Yusuf, sebagai penyemangat langkah saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Dengan keikhlasannya mereka selalu mendukung dan membantu serta memotivasi kepada saya sehingga disertasi ini dapat selesai.
- Rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang telah memberikan doa dan dukungannya serta motivasi kepada saya sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- Semua kerabat dan handai-taulan yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas semua bantuan moril serta dorongan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam disertasi ini, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan pembaca.

Surabaya, 10 Januari 2020
Penulis,

YUSUF MUSTAFA

RINGKASAN DISERTASI

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat dinamis pasca 4 (empat) kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Salah satu perubahan yang terjadi adalah ketentuan tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi). Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan tersebut merupakan hasil perubahan ke-3 (tiga) pada tahun 2001, di mana sebelum perubahan tersebut, bunyi Pasal tersebut adalah “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” hal ini menandakan adanya pergeseran terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat (demokrasi) yang sebelumnya ada ditangan parlemen (MPR) menjadi demokrasi konstitusional

Dalam perubahan ke-3 tahun 2001 disisipkanlah Pasal 6A UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sehingga pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR tetapi dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Adapun perubahan ketentuan tentang sistem pemilihan presiden tersebut perlu dikaji kembali apakah pergeseran tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara RI khususnya sila ke-4 yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Yang menyiratkan pelaksanaan kedaulatan melalui jalur musyawarah/perwakilan.

Dalam penyusunan disertasi ini, digunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan asas-asas, kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Sedangkan Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian disertasi ini meliputi : Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Historis, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Filosofis.

Landasan teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini ialah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum Pancasila
2. Teori Jenjang Norma
3. Teori Sumber Hukum
4. Teori Hermeneutika Hukum

Berdasarkan analisis pada Bab-bab Pembahasan, secara akademik disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Secara filosofis bahwa hakikat makna “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berdasarkan prinsip : (a) Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan; (b) Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. (c) Terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif, bijaksana, jujur, dan adil atau pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Makna Sila keempat Pancasila merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas melalui sistem musyawarah untuk mufakat guna mendapatkan hasil terbaik dari suatu kebulatan keputusan politik.
2. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sesuai dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah model pemilihan demokrasi perwakilan dengan sistem musyawarah untuk mufakat (*government discussion*). Sedangkan sistem demokrasi secara langsung hanya dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil yang akan menempati posisi sebagai *representative body* (badan perwakilan) guna melaksanakan musyawarah untuk mufakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, mandat yang diberikan oleh rakyat kepada lembaga perwakilan merupakan bentuk implementasi konsep kedaulatan rakyat, sedangkan sistem pemilihan oleh lembaga yang mewakili rakyat tersebut merupakan pengejawantahan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagaimana tertuang dalam sila ke 4 dari Pancasila.

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, secara akademik disarankan sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengubah sistem pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung menjadi sistem pemilihan secara perwakilan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat agar sesuai dengan asas demokrasi yang termaktub dalam sila ke-4 Pancasila.
2. Disarankan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon anggota DPR RI maupun DPD RI harus dilakukan pengetatan dengan menambah syarat bahwa calon wakil rakyat tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela yang bertujuan menjaga kualitas dan kapasitas calon wakil rakyat yang kompeten untuk mewakili rakyat dalam memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI.

ABSTRACT

The research of this dissertation is entitled: "Election of the President and Vice President of the Republic of Indonesia base on 4th element of Pancasila", with two main legal issues: (1) What is the meaning of popularism led by the wisdom of decisions in consultations / representation? (2) Is the system for selecting the President and Vice President of Indonesia in accordance with popular principles led by the wisdom of decisions in deliberations / representation?

The objectives to be realized in this dissertation are: (1) To explore and find "popular meaning led by the wisdom of decisions in consultation / representation"; and (2) To analyze and find "the system of electing the President and Vice President of Indonesia in accordance with popular principles led by the wisdom of decisions in consultations / representation".

This dissertation research is normative research which focuses on the level of harmonization or system related to the President and Vice President of the Republic of Indonesia directly by the people based on popular principles led by the wisdom of decisions in consultations (Pancasila democracy) and according to relevant regulations.

In this dissertation research several theories are used as knife analysis, namely theory The state of Pancasila law, the level theory of Norms, the theory of the source of law and the Hermeneutic Law theory, and uses two explanations of concepts, namely the concept of democratic state and popular concept which is led by wisdom in deliberation / representation.

In analyzing legal issues discussed, in this dissertation research uses several approaches, including: Legislative approaches, historical approaches, conceptual approaches and philosophical approaches.

From the results of the discussion and analysis, conclusions are obtained as answers to the problems proposed as follows:

1. Philosophically that the meaning of "populism led by wise wisdom in deliberation / representation" is democracy, namely the government of the people, by the people, and for the people, based on the principles of: (a) Consultation, that is, making decisions unanimously, by together through the path of wisdom; (b) Carry out decisions based on honesty. Decisions are unanimous so as to bring the consequences of honesty together. (c) The principle of populism, which is a sense of love for the people, fights for the ideals of the people, and has a popular spirit. The principle of deliberation to reach consensus, which is to pay attention to and respect the aspirations of all the people through consultative forums, respecting differences, prioritizing the interests of the people, nation and state. Statements led by wisdom are leaders who are sound, rational, intelligent, skilled, conscientious, wise, wise, honest, and just or leaders who wisdom leads to professional leaders (wisdom) through the order and guidance of consultation/representative. The fourth meaning of the precepts of Pancasila is a representative-democratic system led by people who are

professional and have integrity through a deliberative system to reach consensus in order to get the best results from a round of political decisions.

2. The system of electing the President and Vice President of the Republic of Indonesia in accordance with democratic principles led by wisdom in deliberation / representation is a model for the election of representative democracy with a deliberative system for consensus. While the democratic system is only implemented directly to elect representatives who will occupy positions as representative bodies (representative bodies) to carry out deliberations for consensus in the election of the President and Vice President of the Republic of Indonesia. Therefore, the mandate given by the people to representative institutions is a form of implementation of the concept of popular sovereignty, while the electoral system by institutions that represent the people is the embodiment of the people's principles led by wisdom in consultation / representation as set forth in the fourth element from Pancasila

Keywords: *Direct election of the President and Vice President by the people, the fourth element from Pancasila*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Disertasi	v
Kata Pengantar	vi
Ringkasan	ix
Abstract	xii
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5 Orisinalitas Penelitian	8
1.6 LandasanTeori dan Penjelasan Konsep.....	12
1.6.1. LandasanTeori.....	12
1.6.1.1. Teori Negara Hukum Pancasila	12
1.6.1.2. Teori Jenjang Norma	30
1.6.1.3. Teori Sumber Hukum	35
1.6.1.4. Teori Hermeneutika Hukum	44
1.6.2.PenjelasanKonsep.....	58
1.6.2.1. Konsep Demokrasi.....	58
1.6.2.2. Konsep Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permasyarakatan/Perwakilan	63
1.7 Metode Penelitian	66
1.7.1. Jenis Penelitian	66
1.7.2. Pendekatan Masalah	68
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	69
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..	70
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	71
1.8 Pertanggungjawaban Sistematika.....	71
BAB II MAKNA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN	
2.1 Sejarah Lahirnya Pancasila	73
2.2 Kedudukan Pancasila di Indonesia.....	81

2.3 Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia.....	86
2.4 Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	88
2.5 Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum.....	90
2.6 Hubungan Antara Nilai-Nilai Pancasila dan Hukum	94
2.7 Pancasila Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Hukum di Indonesia	97
2.8 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan	107
 BAB III	
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN	
3.1 Demokrasi Pancasila Sebagai Denyut Nadi Lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat Indonesia	129
3.2 Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Negara Kebangsaan Yang Berkerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.....	146
3.3 Dasar Filosofis Demokrasi Perwakilan Dalam Perspektif Pancasila.....	153
3.4 Penguatan Institusi Kedaulatan Rakyat Sebagai Implementasi Demokrasi Pancasila	174
3.5 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Saat Ini	186
3.6 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan	197
 BAB IV	
PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	213
4.2 Saran.....	214
 DAFTAR BACAAN	215